

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Indonesia tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan hukum WTO yang digugat oleh Uni Eropa yaitu *article XI GATT 1994* mengenai *quantitative restriction*. Hal ini dikarenakan adanya tindakan pengecualian dalam hal ekonomi yang membolehkan Indonesia melaksanakan pembatasan kuantitatif apabila telah memenuhi dua syarat dalam *article XVIII:4a GATT 1994* yaitu “*can only support low standards of living*” dan “*early stages of development*” dimana kedua syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Indonesia. Selain itu kebijakan Pemerintah Indonesia juga tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang dianut oleh WTO. Prinsip-prinsip umum WTO yang meliputi perdagangan yang tidak diskriminatif, perdagangan yang bebas, persaingan yang adil, keterbukaan informasi, dan semangat mendorong pembangunan pada negara berkembang merupakan prinsip-prinsip yang dipenuhi dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan nikel yang berkaitan dengan ekspor.

2. Dasar alasan (argumentasi) yang dapat digunakan Indonesia untuk membenarkan kebijakannya tersebut sudah berdasar pada Persetujuan WTO. Tindakan pembatasan ekspor nikel dilaksanakan karena ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memerangi kemiskinan serta adanya keinginan besar untuk terlepas dari ketergantungan yang berlebihan pada produksi primer, sehingga diberlakukanlah hilirisasi yang juga sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai *article XVIII:4a* sebagai pengecualian dalam hal ekonomi. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan nikel yang berkaitan dengan ekspor tidak bertentangan dengan persetujuan WTO. Persetujuan WTO yang juga dicerminkan dalam prinsip-prinsip umum WTO sebagai landasan filosofis yang mengatur tentang perdagangan antar negara anggota WTO yang antara lain meliputi perdagangan yang tidak diskriminatif, perdagangan yang bebas, persaingan yang adil, keterbukaan informasi dan semangat mendorong pembangunan pada negara berkembang merupakan prinsip-prinsip yang dipenuhi dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pemurnian nikel yang berkaitan dengan ekspor, sehingga menguatkan posisi Indonesia yang mengatur perdagangan nikel sesuai dengan persetujuan WTO.

B. Saran

Diplomasi dagang yang berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara intensif dan persuasif terhadap negara-negara Uni Eropa, terutama negara yang selama ini merupakan pengguna utama nikel dari Indonesia. Selain itu, pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi pemurnian nikel yang atraktif bagi investor dari Uni Eropa perlu dipertimbangkan agar negara-negara tersebut berminat besar melakukan investasi di Indonesia, dan nikel tersebut dapat diekspor ke negara-negara bersangkutan sebagai bahan baku industri lanjutan. Aturan yang dengan tegas menyatakan bahwa nikel tetap diperbolehkan diekspor apabila telah melalui proses pemurnian juga perlu dibentuk oleh Indonesia, sehingga negara-negara pengguna nikel tidak merasa khawatir atas kelangsungan industri mereka yang berbahan baku nikel. Selain itu, Pemerintah Indonesia dapat menggunakan ketentuan yang ditetapkan dalam *GATT Article XVIII:4a* yang memberikan pengecualian terhadap pembatasan ekspor apabila pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi ketergantungan negara pada industri primer dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahap pembangunan yang sedang berlangsung di negara tersebut, sebagai argumentasi dalam rangka menguatkan posisi mereka dalam panel yang sedang berlangsung

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf Warouw, 2004, *GATS: Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan Dalam Perdagangan Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Erwidodo, dkk, 2018, *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, IAARD Press, Jakarta
- Habib A.Hasnan, 1997, *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan International*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Hammond, C.R., 2000, "*The elements*". Dalam John R. Rumble, 2018, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, edisi ke 99, FL: CRC Press, Boca Raton.
- Harry Waluya, 2003, *Ekonomi Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, hlm. 35.
- Peter Van den Bossche, dkk, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Triyana Yohanes, 2019, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, 05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

- Farid Maulana, 2018, *Pembatasan Ekspor dan Kewajiban Membangun Smelter Dikaitkan dengan Ekspropriasi dalam Konteks Hukum Investasi Internasional*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Kurniawati Sa'adah, 2013, *Kebijakan Cina Membatasi Ekspor LTJ (Logam Tanah Jarang) ke Amerika Serikat*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
- Nicholas Parsintaan Pasaribu, 2020, *Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Niken Larasati Adhystya, 2019, *Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa 2014-2017*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Hukum/Putusan Pengadilan

WTO Agreement 1994 and Annexes

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.010/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 3 Desember 2014

Jurnal

Ade Maman Suherman, 2008, "Perdagangan Bebas (*Free Trade*) dalam Perspektif Keadilan Internasional, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 5 No. 2, Universitas Indonesia.

Burns H. Weston, 1978, "Basic Human Needs: The International Law Connection: Remarks by the Chairman", *Journal ASIL Annual Meeting*, Volume 72, Cambridge University Press.

Steve Charnovitz, 2006, "International Trade and Developing Countries", *Fordham International Law Journal*, Vol. 29 No. 2, Fordham University School of Law.

Ukar Wijaya Soelistijo, 2013, "Prospect of Potential Nickel Added Value Development in Indonesia". *Earth Science*. Vol. 2 No. 6.

Wisnu Aryo Dewanto, 2015, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 1, Universitas Parahyangan.

Artikel web :

Caterin M. Simamora, World Trade Organization (WTO), <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses 21 Agustus 2020.

Ceic Data, GDP Per Kapita,

<https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gdp-per-capita>, diakses 4 Maret 2022.

Ceic Data, Uni Eropa Pdb Per Kapita,

<https://www.ceicdata.com/id/indicator/european-union/gdp-percapita#:~:text=Pdb%20Per%20Kapita%20Uni%20Eropa%20dilaporkan%20sebesar%2034%2C244.412%20USD%20pada%202020>, diakses 4 Maret 2022.

European Commission-Press Release, EU Files WTO Panel Request Against Illegal Export Restriction by Indonesia On Raw materials for Stainless Steel, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105, diakses pada 26 Oktober 2021.

European Commision, EU Launches WTO Challenge Against Indonesian Restriction on Raw Materials, <https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-institution-news/eu-launches-wto-challenge-against-indonesian-restrictions-on-raw-materials/>, diakses 30 Agustus 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nikel, <https://kbbi.web.id/nikel>, diakses 05 September 2021.

Ministry of Economy, Trade and Industry Japan, Chapter 6: Subsidies and Countervailing Measures, <https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gCT0006e.pdf>, diakses 26 Oktober 2021

M. Teguh Maulana, Lembar Fakta-Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia di WTO, <https://igj.or.id/gugatan-uni-eropa-terhadap-larangan-ekspor-konsentrat-nikel-olehindonesia-di-wto>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Sony, Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar Dunia, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>, diakses 20 September 2021.

The International Trade Association, WTO Subsidies Agreement, <https://www.trade.gov/trade-guide-wto-subsidies>, diakses 10 Agustus 2021.

Tri Harnowo, Mengenal Subsidi yang Dilarang Dalam Perdagangan Internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd25ec134914/mengenal-subsidi-yang-dilarang-dalam-perdagangan-internasional/>, diakses 24 Agustus 2021.

The World Bank, The World by Income and Region,

<https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world->

by-income-and-region.html#:~:text=The%20World%20Bank%20classifies%20economies,%2Dmiddle%2C%20and%20high%20income, diakses 4 Maret 2022.

The World Bank, World Bank Country and Lending Groups, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>, diakses 4 Maret 2022.

Vale, Nikel, <http://www.vale.com/indonesia/BH/business/mining/nickel/Pages/default.aspx>, diakses 08 Agustus 2021.

World Trade Organization, WTO in Brief, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm, diakses 08 Agustus 2021.

World Trade Organization, Dispute Settlement Body, hlm.1, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm, diakses 8 Juni 2022.

World Trade Organization, Dispute Settlement, hlm. 1, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, diakses 05 September 2021.

World Trade Organization, Principles of The Trading System, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses 24 Agustus 2021.

Berita

Administrator, Posisi Indonesia Sulit Tersaingi, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/posisi-indonesia-sulit-tersaingi>, diakses 20 Agustus 2021.

Agung Pribadi, Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>, diakses 20 Agustus 2021.

Akhdi Martin Pratama, Ini Alasan Pemerintah Larang Ekspor Nikel Mulai 2020, <https://money.kompas.com/read/2019/09/02/143000826/ini-alasan-pemerintah-larang-ekspor-nikel-mulai-2020>, diakses 3 Maret 2022.

Anisyah Al Faqir, Mengupas Larangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa, <https://www.merdeka.com/uang/mengupas-larangan-ekspor-nikel-indonesia-ke-uni-eropa.html?page=2>, diakses 20 Agustus 2021.

CNN Indonesia, Melihat Kronologi Larangan Ekspor Nikel dan Keuntungannya, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826100554-85-424663/melihat-kronologi-larangan-ekspor-nikel-dan-keuntungannya>, diakses 3 Maret 2022.

Idris Rusadi Putra, Awal Mula Larangan Ekspor Nikel Indonesia Hingga Digugat Uni Eropa ke WTO, <https://www.merdeka.com/uang/awal-mula-larangan-ekspor-nikel-indonesia-hingga-digugat-uni-eropa-ke-wto.html>, diakses 3 Maret 2022.

Muhammad Idris, Mengenal Nikel; Logam yang disamakan Edhy Prabowo dengan Lobster, <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/152402426/mengenal-nikel-logam-yang-disamakan-edhy-prabowo-dengan-lobster?page=all>, diakses 08 Agustus 2021.

Muhammad Idris, Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa, <https://money.kompas.com/read/2019/12/13/135100626/larangan-ekspor-bijih-nikel-dan-nasib-suram-industri-baja-eropa?page=all>, diakses 20 Agustus 2021.

Wilda Asmarini, 30 Smelter Jalan, Produksi Bijih Nikel RI Melonjak 3x di 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201113113713-4-201608/30-smelter-jalan-produksi-bijih-nikel-ri-melonjak-3x-di-2024>, diakses 10 Agustus 2021.